



ARTIKULASI WACANA DALAM KOMUNIKASI KELUARGA : ANALISIS DISHARMONI RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF LACLAU & MOUFFE

Ni Luh Manik Puja Dewi ^{a,1}

^a Setda Kabupaten Tabanan, Indonesia

¹ Corresponding Author, email: niluhmanikpujadewa79@gmail.com (Dewi)

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 21-03-2025

Revised: 23-04-2025

Accepted: 25-05-2025

Published: 30-05-2025

Keywords:

discourse,
articulation, family
communication,
household
disharmony

ABSTRACT

Marital disharmony often occurs when inconsistencies emerge between words and actions within intimate relationships. Such tension reflects not only a failure in communication but also a deeper struggle over meaning shaped by social and cultural structures. This study examines how discursive articulations within family communication construct and influence marital disharmony through the theoretical framework of Ernesto Laclau and Chantal Mouffe. Employing a qualitative approach and critical discourse analysis, the research analyzes anonymized online news reports of domestic conflicts in Bali. The findings reveal that disharmony frequently arises from the intersection of traditional discourses emphasizing obedience, hierarchy, and patriarchal values with modern discourses promoting equality, openness, and emotional reciprocity. Hegemonic meanings such as the "ideal obedient wife" and "husband as family head" remain culturally dominant but are increasingly contested by more egalitarian interpretations. This study argues that disharmony should not merely be regarded as a relational breakdown but as a discursive moment that allows families to renegotiate the meanings of love, responsibility, and harmony within the dynamics of contemporary Balinese culture.

PENDAHULUAN

Dalam setiap hubungan rumah tangga, setiap pasangan tentu mengharapkan terwujudnya kehidupan yang harmonis, saling menghargai, dan penuh kehangatan emosional. Keharmonisan tersebut bertumpu pada fondasi kepercayaan, kejujuran, dan keselarasan antara ucapan dengan tindakan dalam keseharian. Komunikasi yang jujur dan konsisten menjadi kunci utama dalam menjaga keutuhan relasi interpersonal, karena melalui komunikasi, pasangan membangun makna bersama tentang cinta, tanggung jawab, dan komitmen. Namun, dalam kenyataannya, tidak sedikit hubungan rumah tangga yang mengalami ketegangan akibat ketidaksesuaian antara perkataan dan perbuatan. Ketika salah satu pihak kerap berjanji, menyatakan kasih, atau memberikan harapan tanpa disertai tindakan nyata, maka kepercayaan perlahan terkikis dan menimbulkan rasa kecewa, curiga, bahkan marah. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada munculnya kesalahpahaman, tetapi juga dapat memperlemah rasa saling menghargai serta menurunkan kualitas emosional

hubungan. Ketidakharmonisan semacam ini, apabila tidak disadari dan diatasi secara komunikatif, berpotensi berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang mengancam keberlangsungan rumah tangga. Oleh karena itu, memahami bagaimana makna dan komunikasi bekerja dalam membentuk harmoni dan disharmoni keluarga menjadi hal penting dalam kajian komunikasi dan budaya kontemporer.

Dalam diskursus publik, disharmoni rumah tangga sering dijelaskan sebagai kegagalan individu dalam menjaga komunikasi dan keintiman emosional. Namun, perspektif ini cenderung bersifat psikologis dan kurang melihat bagaimana bahasa dan wacana membentuk realitas hubungan keluarga. Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe (1985) melalui teori wacana hegemonik berargumen bahwa realitas sosial tidak pernah netral; ia merupakan hasil konstruksi makna melalui proses artikulasi dan pertarungan hegemonik. Dengan demikian, komunikasi keluarga dapat dipahami bukan sekadar pertukaran pesan, melainkan arena artikulasi makna di mana setiap anggota berjuang memaknai peran, tanggung jawab, dan nilai-nilai yang mengatur hubungan mereka.

Dikutip dari <https://validnews.id/nasional/perceraian-tak-hanya-menghasilkan-perpisahan>, Jumlah perceraian pada tahun 2025 sudah melampaui total angka perceraian pada 2020, yakni sebanyak 291.677. Bahkan, jumlah perceraian terus meningkat di Indonesia, karena pada 2021 melonjak tajam menjadi 444.734 kasus dan bertambah lagi menjadi 448.126 kasus. Sebelumnya, jumlah perceraian di Indonesia ini sempat menurun pada tahun 2023, jumlahnya sebanyak 408.3467 kasus. Namun, jumlahnya kembali meningkat drastis menjadi 466.359 kasus pada tahun 2024. Dari catatan BPS, ada sejumlah faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian. Faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi penyebab tertinggi perceraian. Setidaknya, ada 251.125 kasus pada 2024, atau turun sedikit dibandingkan 2023 sebanyak 251.828 kasus, yang disebabkan karena perselisihan atau pertengkaran terus menerus. Sementara itu, perceraian akibat poligami juga meningkat, dari 738 kasus menjadi 849 kasus. Kasus perceraian akibat zina juga meningkat dari 780 menjadi 1.005 kasus.

Kondisi ini sungguh memprihatinkan, karena begitu banyak pasangan suami istri yang hubungannya mengalami disharmoni sehingga berujung pada perpisahan akibat tidak mampu menyelesaikan konflik mereka dan yang kemudian berdampak terhadap psikis anak-anak yang menjadi korban perceraian kedua orang tuanya. Dalam konteks rumah tangga Indonesia, terutama di Bali yang masih kental dengan nilai-nilai patriarki dan adat istiadat, wacana tentang keluarga ideal cenderung diartikulasikan melalui norma tradisional seperti purusa-pradhana (peran laki-laki dan perempuan) serta nilai kesetiaan dan kepatuhan terhadap pasangan (Subagia, 2016). Namun, dalam era modern dan globalisasi, nilai-nilai ini mengalami dislokasi akibat munculnya wacana baru tentang kesetaraan gender, peran ganda perempuan, dan kebebasan individu (Suryani, 2021). Disharmoni rumah tangga kemudian dapat dilihat sebagai hasil benturan dua wacana yang berusaha mempertahankan atau menantang hegemoni lama.

Pendekatan Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe menjadi relevan karena menempatkan komunikasi sebagai praktik artikulasi makna dalam ranah sosial yang penuh pertarungan. Menurut mereka, setiap tatanan sosial adalah hasil dari “proses hegemonik” yang bersifat kontingen, artinya bisa berubah seiring negosiasi makna antara aktor-aktor sosial (Laclau & Mouffe, 1985). Dalam rumah tangga, aktor-aktor tersebut adalah suami, istri, dan anak yang saling mengonstruksi makna tentang “keluarga harmonis”, “peran ideal”, atau “kewajiban moral”. Dengan demikian, penelitian ini mencoba mengungkap bagaimana wacana harmoni dan disharmoni dikonstruksikan dalam komunikasi keluarga. Studi ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis dengan data utama berupa berita daring di Bali yang menyoroti konflik rumah tangga, nama dan identitas subjek disamarkan untuk menjaga etika

penelitian. Analisis difokuskan pada bagaimana makna tentang harmoni, peran, dan otoritas dikonstruksi, dinegosiasikan, dan dipertentangkan di dalam komunikasi keluarga, serta bagaimana hegemoni wacana tradisional dan modern bertarung dalam membentuk struktur makna rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada konstruksi wacana mengenai disharmoni rumah tangga sebagaimana direpresentasikan dalam pemberitaan media daring di Bali. Fokus analisis diarahkan untuk menelusuri bagaimana makna-makna seperti kesetiaan, tanggung jawab, dan cinta diartikulasikan dalam teks berita, serta bagaimana makna-makna tersebut membentuk relasi hegemonik antara suami, istri, dan masyarakat dalam ruang diskursif budaya Bali. Pendekatan ini penting karena media tidak hanya menjadi sarana penyampai informasi, tetapi juga ruang produksi makna yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan ideologis tertentu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis*). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali secara mendalam makna yang tersembunyi di balik teks dan simbol komunikasi yang muncul dalam pemberitaan. Analisis wacana kritis digunakan untuk mengungkap bagaimana bahasa membentuk realitas sosial serta bagaimana kekuasaan dan ideologi beroperasi melalui praktik komunikasi. Kerangka teori yang digunakan merujuk pada pemikiran Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe yang menekankan bahwa setiap realitas sosial bersifat konstruktif, terbentuk melalui proses artikulasi, dan senantiasa berada dalam pertarungan makna yang hegemonik. Dengan menggunakan perspektif ini, penelitian berupaya memahami bagaimana wacana tentang harmoni dan disharmoni keluarga dinegosiasikan dalam konteks budaya Bali yang tengah mengalami perubahan nilai antara tradisi dan modernitas.

Sumber data utama penelitian berasal dari berita daring lokal di Bali (nama media dan individu disamarkan) yang menyoroti kasus konflik rumah tangga di kalangan pekerja pariwisata di Kabupaten "S.". Pemilihan kasus dilakukan secara purposif, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa kasus tersebut merepresentasikan pertarungan wacana antara nilai-nilai tradisional yang patriarkal dengan nilai-nilai modern yang mengedepankan kesetaraan gender dan komunikasi reflektif. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder berupa literatur akademik terkait komunikasi keluarga, budaya Bali, dan teori wacana. Beberapa sumber rujukan di antaranya adalah karya Suryani (2021), Subagia (2016), dan Utama (2022), yang digunakan untuk memperkuat interpretasi teoretis serta memberikan konteks sosiokultural terhadap fenomena yang dikaji.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses pemilihan teks berita yang relevan dengan tema disharmoni rumah tangga dan mengandung unsur artikulasi makna mengenai peran gender, komunikasi, dan nilai keluarga. Tahap kedua adalah interpretasi wacana, yang dilakukan dengan membaca teks secara mendalam untuk mengidentifikasi penanda-penanda utama (*signifiers*) yang membentuk rantai makna dalam wacana harmoni dan disharmoni. Pada tahap ini, peneliti menelusuri bagaimana bahasa digunakan untuk meneguhkan atau menantang hegemoni nilai-nilai tradisional. Tahap ketiga adalah analisis artikulasi dan hegemoni, yaitu menafsirkan hubungan antarpemanda tersebut dalam kerangka teori Laclau dan Mouffe guna melihat bagaimana makna-makna sosial dipertarungkan dan direartikulasi.

Melalui tahapan analisis tersebut, penelitian ini berupaya menyingkap bagaimana media berperan dalam mereproduksi maupun menggeser makna tentang harmoni keluarga di Bali. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa disharmoni rumah tangga bukan semata-mata persoalan psikologis atau moral, melainkan cerminan dari dinamika

wacana sosial dan ideologis yang terus berubah dalam masyarakat Bali kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

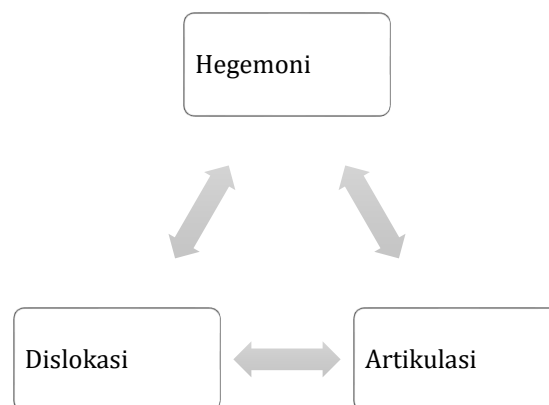
Bagian ini membahas hasil analisis terhadap konstruksi wacana disharmoni rumah tangga sebagaimana direpresentasikan dalam pemberitaan media daring di Bali dengan menggunakan perspektif teori wacana Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe. Analisis dilakukan untuk menelusuri bagaimana makna tentang kesetiaan, tanggung jawab, dan cinta diartikulasikan dalam praktik komunikasi keluarga, serta bagaimana makna tersebut membentuk relasi hegemonik antara suami, istri, dan masyarakat.

Dalam kerangka teori Laclau dan Mouffe (1985), setiap wacana sosial merupakan hasil konstruksi yang bersifat kontingen dan terbuka terhadap negosiasi. Realitas sosial tidak berdiri secara objektif, melainkan dibangun melalui proses artikulasi makna yang saling bertarung untuk memperoleh posisi hegemonik. Dengan demikian, disharmoni rumah tangga tidak sekadar mencerminkan kegagalan komunikasi, tetapi juga menunjukkan dinamika ideologis dalam perebutan makna “keluarga harmonis” di antara berbagai sistem nilai yang beroperasi di masyarakat Bali.

Pembahasan ini disusun dalam tiga bagian utama. Bagian pertama menelaah hegemoni wacana tradisional dalam komunikasi keluarga, yang membentuk pemahaman normatif tentang peran dan keharmonisan rumah tangga. Bagian kedua membahas artikulasi dan negosiasi makna antara tradisi dan modernitas, yaitu proses ketika pasangan suami istri menegosiasikan ulang makna harmoni melalui praktik komunikasi reflektif. Bagian ketiga mengulas dislokasi dan rekonstruksi harmoni baru dalam keluarga Bali, yang menunjukkan bagaimana perubahan sosial, ekonomi, dan budaya melahirkan bentuk harmoni yang lebih setara dan dialogis.

Melalui struktur pembahasan ini, penelitian berupaya menunjukkan bahwa disharmoni keluarga tidak semata-mata merupakan disfungsi relasi interpersonal, melainkan bagian dari proses transformasi wacana yang menandai perubahan ideologis dalam masyarakat Bali kontemporer.

Gambar 1 Kerangka konseptual Wacana Disharmonis Keluarga



Gambar 1 menggambarkan dinamika wacana dalam keluarga yang mengalami ketegangan atau disharmoni, sebagaimana dijelaskan melalui kerangka teori Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe. Model ini menunjukkan bahwa realitas sosial dalam keluarga tidak bersifat tetap, melainkan selalu bergerak melalui tiga proses utama yang saling berkaitan: hegemoni, dislokasi, dan artikulasi.

Pada tahap hegemoni, makna dan nilai-nilai tertentu mendominasi cara berpikir dan

bertindak anggota keluarga. Dalam konteks budaya Bali, hegemoni ini muncul melalui wacana tradisional tentang “keluarga harmonis” yang menekankan kepatuhan, hierarki, serta peran gender yang kaku. Hal ini seperti pandangan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri merupakan penjaga ketenangan domestik. Hegemoni bekerja melalui bahasa, kebiasaan, dan norma sosial yang dianggap wajar sehingga tidak lagi disadari sebagai bentuk kekuasaan simbolik.

Tahap dislokasi terjadi ketika sistem makna hegemonik mulai terguncang oleh pengalaman sosial baru yang tidak dapat dijelaskan oleh struktur lama. Dalam konteks keluarga modern, dislokasi dapat muncul akibat pergeseran peran ekonomi perempuan, perubahan nilai kesetaraan gender, serta meningkatnya refleksivitas individu. Ketika nilai tradisional tidak lagi mampu menampung realitas baru, muncul krisis makna yang memicu ketegangan emosional dan konflik dalam rumah tangga. Namun, dislokasi tidak selalu destruktif; justru di sinilah potensi perubahan sosial terbuka, karena ruang interpretasi baru mulai terbentuk.

Tahap selanjutnya adalah artikulasi, yaitu proses penataan ulang makna setelah terjadi dislokasi. Pada fase ini, anggota keluarga berusaha menegosiasikan kembali nilai-nilai lama dan baru melalui praktik komunikasi sehari-hari. Dialog, empati, dan kesediaan mendengarkan menjadi sarana utama dalam membentuk harmoni baru yang lebih setara dan reflektif. Artikulasi memungkinkan nilai tradisional seperti bakti dan menyama braya tetap hidup, namun dengan makna yang lebih kontekstual. Hal ini bukan lagi kepatuhan sepihak, melainkan penghargaan timbal balik dan kerja sama emosional.

Siklus hegemoni–dislokasi–artikulasi dalam model ini menunjukkan bahwa disharmoni keluarga bukan semata kegagalan komunikasi, tetapi bagian dari proses sosial yang dinamis. Setiap konflik rumah tangga sesungguhnya mencerminkan upaya keluarga untuk menemukan keseimbangan baru antara nilai tradisional dan kesadaran modern. Dengan demikian, komunikasi keluarga berperan sebagai ruang politik mikro yang terus memproduksi, mengguncang, dan merumuskan kembali makna harmoni sesuai dengan konteks sosial dan budaya yang berubah.

Kerangka Konseptual: Membaca Komunikasi Keluarga melalui Teori Wacana Laclau & Mouffe

Pemikiran Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe (1985) tentang teori wacana berangkat dari pandangan bahwa realitas sosial tidak pernah bersifat tetap atau netral. Dunia sosial dibangun melalui proses artikulasi makna, yakni praktik menghubungkan elemen-elemen tanda, nilai, dan identitas ke dalam suatu tatanan simbolik yang bersifat sementara. Dalam pandangan ini, makna selalu bersifat kontingen, karena dibentuk melalui relasi kuasa dan negosiasi antaraktor sosial yang berupaya mempertahankan posisi hegemoniknya. Dengan demikian, setiap sistem sosial dan budaya dapat dipahami sebagai hasil dari pertarungan wacana yang saling berusaha meneguhkan legitimasi makna tertentu. Konsep penting dalam kerangka ini adalah hegemoni, yaitu kondisi ketika satu wacana berhasil menampilkan dirinya sebagai “kebenaran” yang tampak alami dalam masyarakat. Hegemoni tidak dicapai melalui paksaan, melainkan melalui persetujuan simbolik dan bahasa yang diterima bersama. Namun, tatanan hegemonik ini tidak pernah final. Ketika muncul pengalaman sosial baru yang tidak dapat dijelaskan oleh struktur makna lama, terjadi apa yang disebut dislokasi, yaitu momen krisis yang mengguncang kestabilan makna. Dislokasi membuka ruang bagi munculnya artikulasi baru. Sebuah upaya individu atau kelompok untuk menyusun kembali makna dan nilai sesuai dengan konteks sosial yang berubah (Laclau, 1990; Mouffe, 2000).

Dengan menggunakan perspektif ini, komunikasi keluarga dipahami bukan sekadar

pertukaran pesan antarpersonal, melainkan sebagai arena artikulatif ketika nilai-nilai seperti cinta, tanggung jawab, bakti, dan kesetaraan dinegosiasikan. Dalam konteks budaya Bali, praktik komunikasi keluarga mencerminkan proses ideologis, wacana tradisional yang menekankan hierarki dan kepatuhan berhadapan dengan wacana modern yang menuntut kesetaraan, refleksi, dan partisipasi emosional. Ketika dua sistem nilai ini bertemu, komunikasi menjadi ruang hegemoni mikro. Tempat keluarga menata ulang makna harmoni melalui dialog, empati, dan kesadaran simbolik.

Oleh karena itu, pendekatan Laclau dan Mouffe memberi kerangka analisis yang relevan untuk membaca disharmoni rumah tangga bukan sebagai kegagalan komunikasi, melainkan sebagai proses sosial yang menandai perubahan tatanan makna. Ketegangan, perbedaan, dan konflik antara pasangan justru dapat dilihat sebagai momen dislokasi yang membuka peluang rekonstruksi nilai. Dalam perspektif ini, keluarga tidak hanya menjadi unit sosial terkecil, tetapi juga menjadi ruang diskursif tempat makna tentang cinta, kekuasaan, dan harmoni terus diproduksi dan dinegosiasikan sesuai dinamika budaya dan zaman.

Hegemoni Wacana Tradisional dalam Komunikasi Keluarga

Dalam masyarakat Bali, struktur sosial-kultural yang masih berlandaskan sistem patrilineal dan budaya patriarki membentuk konstruksi wacana keluarga yang hegemonik. Sistem ini menempatkan laki-laki sebagai purusa (unsur aktif dan spiritual) dan perempuan sebagai pradhana (unsur material dan domestik). Posisi simbolik tersebut berimplikasi pada pembentukan pola komunikasi keluarga yang hierarkis, di mana suara laki-laki lebih dominan dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Penelitian Wardani dan Yunanto (2023) menunjukkan bahwa meskipun ajaran Hindu menekankan keseimbangan dan kesetaraan, praktik budaya Bali masih memperlihatkan ketimpangan yang kuat, terutama dalam ranah domestik dan pewarisan nilai keluarga. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana wacana “keluarga harmonis” dibangun atas struktur makna yang menormalisasi perbedaan peran berbasis gender.

Dalam kerangka teori wacana Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe (1985), fenomena tersebut menunjukkan bagaimana makna sosial terbentuk melalui proses artikulasi hegemonik yang berupaya menjadikan tatanan tertentu tampak wajar dan alami. Melalui proses ini, nilai-nilai seperti kepatuhan, kesetiaan, dan pengabdian istri diartikulasikan secara simbolik untuk menopang legitimasi kekuasaan suami sebagai kepala keluarga. Hegemoni ini tidak hanya hadir dalam teks keagamaan atau adat, tetapi juga dalam praktik komunikasi sehari-hari, seperti cara berbicara, pola pengambilan keputusan, dan ekspresi emosional yang diatur sesuai norma sosial (Jørgensen & Phillips, 2002).

Penelitian Ayu dan Fikriyati (2024) menguatkan bahwa budaya patriarki di Bali tidak hanya membentuk perilaku sosial, tetapi juga menstrukturkan sistem komunikasi keluarga. Dalam banyak kasus, perempuan dituntut untuk menjaga ketenangan dan menghindari konflik, sehingga diam seringkali dimaknai sebagai bentuk cinta dan bakti. Pandangan ini menegaskan dominasi wacana tradisional yang menganggap harmoni rumah tangga sebagai hasil kepatuhan istri terhadap suami. Narasi serupa juga kerap muncul dalam pemberitaan media lokal yang menggambarkan “istri sibuk bekerja” sebagai penyebab retaknya keharmonisan keluarga, sementara tanggung jawab emosional suami jarang dipersoalkan. Representasi semacam ini memperkuat hegemoni nilai tradisional dan meneguhkan pandangan bahwa kegagalan rumah tangga bersumber dari pelanggaran terhadap norma adat, bukan dari ketimpangan komunikasi atau relasi kuasa (Fairclough, 2003).

Namun, sebagaimana ditegaskan Laclau (1990), setiap hegemoni bersifat rapuh dan selalu berpotensi mengalami dislokasi ketika muncul realitas sosial baru yang tidak dapat dijelaskan oleh struktur lama. Dalam konteks Bali, perubahan sosial akibat pendidikan,

pariwisata, dan ekonomi kreatif mulai mengguncang wacana lama yang menempatkan perempuan sebagai subjek subordinat (Suryani, 2021). Ketika perempuan berperan aktif dalam bidang ekonomi dan publik, muncul ketegangan antara nilai tradisional dan kesadaran baru akan kesetaraan. Dengan demikian, komunikasi keluarga menjadi arena mikro-hegemonik, tempat pertarungan makna antara struktur lama dan aspirasi baru berlangsung secara terus-menerus.

Artikulasi dan Negosiasi Makna antara Tradisi dan Modernitas

Dalam konteks keluarga Bali kontemporer, terjadi proses artikulasi ketika nilai-nilai tradisional seperti *bakti*, kepatuhan istri, dan hierarki suami-istri dihubungkan dengan wacana modern tentang kesetaraan, partisipasi dan komunikasi terbuka. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Yuniari dan Saskara (2023) terhadap generasi “sandwich” di Gianyar menunjukkan bahwa norma budaya Bali dan peran keluarga secara substansial memengaruhi kebahagiaan generasi tersebut; mereka yang berhasil menegosiasikan peran keluarga, dukungan sosial dan norma budaya melaporkan tingkat kebahagiaan lebih tinggi. Data menunjukkan bahwa meskipun norma adat masih hadir, banyak individu mulai menuntut pembagian peran yang lebih adil dan praktik komunikasi yang reflektif (Yuniari & Saskara, 2023).

Selanjutnya, penelitian Wibawa, Hasibuan dan Sisdyani (2023) terhadap perempuan Bali yang aktif sebagai pengelola keuangan keluarga menemukan bahwa perempuan melakukan strategi koordinasi dan transparansi dalam rumah tangga untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus menghormati nilai adat. Temuan ini mengindikasikan bahwa istri di Bali tidak lagi hanya menjadi pelengkap domestik, melainkan juga menjadi mitra dalam mendefinisikan arah keluarga, melalui dialog dan negosiasi makna bersama (Wibawa et al., 2023). Proses artikulasi ini menandai perubahan dalam komunikasi keluarga: dari pola vertikal satu arah menuju pola dialogis yang lebih egaliter. Pasangan suami-istri mulai berbicara bukan sebagai pihak dominan-subordinat, tetapi sebagai co-subjects dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Dengan demikian, makna “harmoni keluarga” direkonstruksi melalui keseimbangan antara nilai tradisional dan modern—bukan dengan meniadakan tradisi, tetapi dengan menegosiasikannya ulang dalam kerangka partisipasi dan kesetaraan.

Dislokasi dan Rekonstruksi Harmoni Baru dalam Keluarga Bali

Perubahan sosial dan ekonomi di Bali telah memicu **dislokasi wacana** dalam konstruksi tradisional keluarga. Dalam kerangka Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe (1985) konsep wacana lama menjadi tidak cukup mampu menjelaskan pengalaman baru ketika muncul elemen sosial yang berbeda. Misalnya, penelitian Wibawa, Hasibuan & Sisdyani (2023) menunjukkan bahwa perempuan Bali yang aktif dalam pengelolaan keuangan keluarga tidak lagi hanya menempati posisi domestik tetapi menjadi mitra strategis dalam pengambilan keputusan keluarga. Dalam kajian tersebut disebutkan bahwa strategi seperti prioritas-peran, koordinasi transparan, dan pembagian tugas secara adil menjadi bagian dari proses negosiasi nilai baru.

Selain itu, studi Yuniari & Saskara (2023) pada generasi sandwich di Gianyar merekam bahwa norma budaya dan dukungan sosial turut memengaruhi kebahagiaan keluarga; data menunjukkan bahwa generasi muda yang mengalami konflik antar-wacana (tradisi vs modernitas) cenderung memiliki tingkat stres yang lebih tinggi karena makna “harmoni” yang mereka jalani dipertanyakan. Kedua temuan tersebut memperlihatkan bahwa ketika wacana tradisional seperti “istri patuh” atau “kepemimpinan suami” mulai digoyang oleh hubungan sosial-ekonomi baru, maka keluarga menjadi arena di mana harmoni

direkonstruksi melalui komunikasi dialogis dan pembagian peran yang lebih setara.

Rekonstruksi ini tidak berarti penghapusan tradisi, melainkan proses artikulasi ulang nilai-nilai lama dalam tatanan yang lebih egaliter. Sebagai contoh, banyak pasangan muda di Bali sekarang memilih pengambilan keputusan bersama dan berbagi tanggung jawab finansial sambil tetap melakukan ritual adat, menunjukkan bahwa harmoni baru lahir dari kesetaraan simbolik, bukan dominasi. Dengan demikian, disharmoni rumah tangga dapat dipahami bukan semata sebagai keretakan relasi, tetapi sebagai momen **agonistik** di mana dua sistem wacana bertarung dan akhirnya melahirkan konfigurasi sosial baru yang lebih inklusif dan manusiawi (Mouffe, 2000).

Disharmoni sebagai Dislokasi Wacana

Disharmoni rumah tangga tidak selalu berarti kegagalan komunikasi atau tanda berakhirnya hubungan. Dalam perspektif teori Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, ketegangan yang muncul dalam keluarga justru dapat dipahami sebagai proses dislokasi wacana, yaitu pergeseran makna sosial ketika struktur lama kehilangan daya jelaskan terhadap realitas baru. Dislokasi terjadi ketika pengalaman hidup modern, seperti partisipasi ekonomi perempuan, perubahan nilai kesetaraan, dan transformasi budaya, menantang tatanan simbolik yang selama ini dianggap wajar dan tidak tergugat. Dalam konteks keluarga Bali, dislokasi tampak melalui benturan antara nilai tradisional yang menekankan hierarki dan pengabdian dengan nilai modern yang mengedepankan dialog, refleksi, dan keseimbangan emosional. Pergeseran ini sering memunculkan ketegangan antara pasangan suami istri, namun sekaligus membuka ruang bagi lahirnya kesadaran baru tentang relasi yang lebih setara. Konflik rumah tangga yang muncul karena perbedaan persepsi mengenai peran dan tanggung jawab bukan sekadar peristiwa emosional, melainkan refleksi dari perubahan struktur makna yang lebih dalam. Ketika istri menolak tunduk pada tafsir tunggal tentang bakti atau suami belajar memahami cinta tanpa dominasi, keduanya sedang menegosiasikan ulang arti harmoni dalam tatanan keluarga kontemporer.

Perubahan sosial di Bali memperlihatkan bahwa harmoni bukan kondisi yang statis, melainkan hasil dari proses komunikasi yang terus diperbarui. Banyak keluarga muda kini mulai membangun praktik komunikasi yang lebih terbuka: berdialog sebelum mengambil keputusan, berbagi tanggung jawab domestik, dan saling mendukung dalam pekerjaan. Pola seperti ini menunjukkan bahwa dislokasi dapat menjadi momen produktif untuk menciptakan keseimbangan baru. Keluarga tidak lagi mengandalkan harmoni yang dibangun atas dasar kepatuhan semata, melainkan harmoni yang tumbuh dari pengertian, kesetaraan, dan kesadaran bersama.

Dalam pandangan Laclau, setiap perubahan makna selalu lahir dari ketegangan antara yang lama dan yang baru. Maka, disharmoni seharusnya dipahami sebagai proses pembentukan identitas yang sedang berlangsung, bukan sebagai ancaman terhadap stabilitas rumah tangga. Keluarga Bali yang sedang beradaptasi dengan modernitas sesungguhnya sedang berupaya menemukan bentuk harmoni baru yang lebih inklusif. Perempuan menjadi subjek yang reflektif dan berdaya tanpa kehilangan nilai spiritualnya, sedangkan laki-laki belajar memaknai kepemimpinan sebagai bentuk tanggung jawab bersama, bukan kekuasaan tunggal. Dengan demikian, disharmoni memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar konflik domestik. Ia adalah cermin dari perjalanan budaya menuju keseimbangan baru antara adat dan kesetaraan. Proses ini mengajarkan bahwa hubungan keluarga yang sehat bukanlah hubungan tanpa perbedaan, melainkan hubungan yang mampu mengelola perbedaan melalui empati dan dialog. Dalam dinamika seperti ini, harmoni tidak lagi dipandang sebagai keadaan yang sudah selesai, tetapi sebagai perjalanan yang terus diperjuangkan melalui komunikasi yang sadar, reflektif, dan manusiawi.

Komunikasi sebagai Medan Hegemoni Mikro

Dalam kehidupan rumah tangga, komunikasi bukan hanya alat untuk menyampaikan pesan, tetapi juga ruang bagi negosiasi makna dan kekuasaan simbolik. Setiap percakapan, diam, atau keputusan antara pasangan mencerminkan proses penataan ulang nilai-nilai yang membentuk relasi mereka. Dalam kerangka teori Laclau dan Mouffe (1985), komunikasi keluarga dapat dipahami sebagai bentuk hegemoni mikro, yaitu medan sosial tempat ideologi dan perasaan bekerja secara halus melalui bahasa. Melalui komunikasi, pasangan suami istri tidak sekadar berbagi informasi, tetapi juga saling membentuk identitas, posisi, dan otoritas moral dalam kehidupan bersama.

Gambar 2 Ilustrasi reflektif tentang dilema disharmoni dan negosiasi makna dalam rumah tangga modern di Bali



Sumber: Viva Bali, 2024. <https://bali.viva.co.id/lifestyle/4354-lebih-baik-bertahan-demi-anak-atau-berpisah-demi-kewarasan>

Komunikasi dalam keluarga tidak pernah bersifat netral. Ia selalu menjadi ruang ketika makna, kuasa, dan identitas dinegosiasikan. Dalam interaksi sehari-hari, bahasa berfungsi bukan hanya untuk menyampaikan pesan, tetapi juga untuk meneguhkan atau menggoyahkan struktur makna yang telah mapan. Ketika suami berbicara dengan nada perintah atau istri memilih diam untuk menghindari pertengkaran, keduanya sesungguhnya sedang berpartisipasi dalam proses artikulasi makna yang berakar pada sejarah kultural dan ideologis. Dalam kerangka Laclau dan Mouffe, praktik semacam ini disebut hegemoni mikro, yaitu bentuk dominasi simbolik yang bekerja secara halus dalam percakapan dan kebiasaan keluarga. Gambar 2 yang memperlihatkan pasangan suami istri duduk berjarak dalam suasana tegang menyajikan representasi visual tentang dislokasi makna dalam relasi rumah tangga. Wajah yang tertunduk, tubuh yang kaku, dan jarak fisik di antara keduanya menjadi tanda yang mengandung pesan simbolik tentang runtuhnya komunikasi dan kehilangan kesalingpahaman. Secara wacana, gambar tersebut menegaskan posisi keluarga sebagai medan ideologis, tempat dua sistem nilai yaitu tradisi dan modernitas yang saling bertarung. Keheningan yang tergambar tidak hanya menandakan putusnya komunikasi, tetapi juga menjadi bentuk resistensi terhadap makna yang hegemonik. Dalam perspektif Fairclough (2003), citra semacam ini memperlihatkan bagaimana media mengonstruksi konflik rumah tangga sebagai drama emosional, bukan sebagai fenomena sosial yang berakar pada ketimpangan simbolik antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, analisis wacana terhadap gambar ini mengungkap bahwa disharmoni keluarga bukan hanya peristiwa psikologis, melainkan proses sosial yang melibatkan pertarungan ide, nilai, dan identitas.

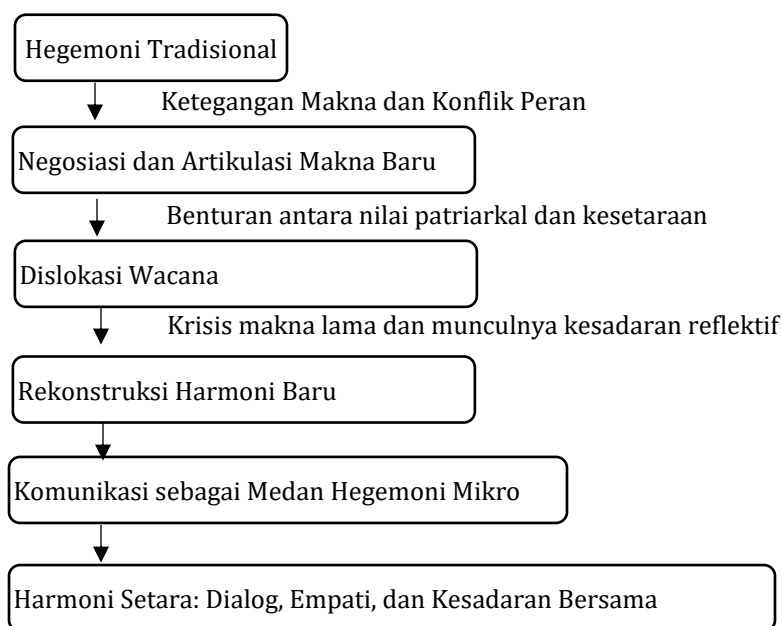
Di tengah perubahan sosial, banyak pasangan muda di Bali mulai menata ulang praktik

komunikasi dalam rumah tangga. Mereka berusaha menggabungkan nilai-nilai adat dengan semangat kesetaraan modern. Keputusan penting keluarga kini lebih sering diambil melalui diskusi bersama, dan tanggung jawab ekonomi dibagi secara proporsional tanpa mengabaikan peran spiritual seperti melaksanakan *mewidhi widana* bersama. Praktik komunikasi reflektif semacam ini menunjukkan terjadinya pergeseran hegemoni dari pola hierarkis menuju pola dialogis. Nilai bakti yang dahulu identik dengan kepatuhan kini dipahami sebagai bentuk penghormatan timbal balik. Relasi yang semula vertikal menjadi lebih sejajar, dan harmoni tidak lagi diukur dari diamnya konflik, tetapi dari kemampuan pasangan mengelola perbedaan dengan kesadaran dan empati.

Dalam pandangan Mouffe (2000), perbedaan tidak selalu menjadi ancaman bagi harmoni. Justru di dalam ketegangan, manusia belajar mengenali dirinya dan orang lain secara lebih utuh. Keluarga Bali yang berhadapan dengan arus modernitas memperlihatkan hal itu: tradisi tetap dijaga sebagai fondasi moral, namun makna-makna lama direartikulasi agar selaras dengan semangat kesetaraan dan penghargaan terhadap otonomi individu. Komunikasi menjadi kunci yang menghubungkan dua arus tersebut. Setiap percakapan menjadi tindakan politis yang menentukan bentuk hegemoni baru dalam keluarga, hegemoni yang lahir dari kesadaran, bukan paksaan; dari dialog, bukan instruksi.

Gambar pasangan yang duduk berjarak tidak lagi hanya mencerminkan perpisahan atau keterasingan, melainkan menandai lahirnya kesadaran baru ketika masing-masing individu mulai memahami kebutuhan, batasan, dan perasaannya sendiri. Keheningan yang hadir di antara mereka dapat menjadi ruang refleksi untuk mengevaluasi dinamika hubungan dan membuka peluang membangun kembali interaksi yang lebih sehat dan setara. Dalam kerangka komunikasi keluarga, momen seperti ini menunjukkan bahwa keluarga merupakan arena demokratis di tingkat mikro, tempat nilai-nilai lama dan baru saling bertemu, bernegosiasi, dan belajar melalui dialog. Dengan demikian, harmoni sejati tidak berarti ketiadaan konflik, melainkan kemampuan mengubah ketegangan menjadi percakapan yang memperdalam pengertian, memperkuat ikatan emosional, serta menumbuhkan kebersamaan yang lebih manusiawi.

Gambar 3 Model Dinamika Artikulasi Wacana Keluarga Bali



Model ini menunjukkan bahwa komunikasi keluarga bekerja sebagai proses artikulatif yang bersifat spiral, bukan linear. Awalnya, wacana tradisional menekankan hierarki gender

dan bakti sebagai kepatuhan. Namun, modernitas, pendidikan, dan peran ekonomi perempuan memunculkan wacana tandingan yang menonjolkan dialog dan kesetaraan (Suryani, 2021; Utama, 2022). Ketegangan antara dua sistem nilai ini menciptakan dislokasi, saat makna lama kehilangan kekuatannya dan keluarga mulai menegosiasikan ulang arti cinta dan tanggung jawab. Sebagaimana dikemukakan Budiasa (2019), wacana berbasis nilai Hindu-Bali dapat menjadi ruang komunikasi yang menolak kekerasan simbolik dan menumbuhkan kesadaran reflektif. Dengan demikian, komunikasi keluarga menjadi arena hegemoni mikro yang melahirkan harmoni baru, bukan tanpa konflik, melainkan sebagai keseimbangan dinamis antara tradisi dan kesetaraan. Model ini sekaligus menjelaskan peran komunikasi sebagai ruang politik simbolik dalam keluarga, sesuai dengan konsep Laclau dan Mouffe (1985) tentang the political as discursive struggle. Melalui model ini, terlihat bahwa keluarga Bali sedang bertransformasi dari struktur patriarkal menuju struktur dialogis tanpa kehilangan akar budayanya.

Transformasi komunikasi keluarga dalam masyarakat Bali memperlihatkan bahwa perubahan sosial tidak selalu terjadi melalui revolusi besar, tetapi melalui negosiasi kecil yang berlangsung di ruang domestik. Setiap percakapan antara suami dan istri, setiap bentuk diam, bahkan setiap gestur saling mendengarkan, menjadi bagian dari proses panjang pembentukan makna yang baru. Di ruang-ruang inilah nilai-nilai tradisional bertemu dengan kesadaran modern dan melahirkan bentuk harmoni yang lebih setara. Keluarga menjadi cermin dari masyarakat yang sedang bertransisi: berusaha menjaga akar budaya, namun sekaligus merespons tuntutan refleksi, kesetaraan, dan otonomi individu.

Melalui pandangan ini, jelas bahwa disharmoni bukan semata tanda kegagalan, tetapi refleksi dari proses reartikulasi nilai dalam kehidupan keluarga yang terus bergerak. Komunikasi menjadi instrumen utama dalam proses ini, karena di sanalah wacana lama dan baru saling bertemu untuk dinegosiasikan. Dengan demikian, studi ini tidak berhenti pada analisis konflik rumah tangga, tetapi membuka pemahaman baru tentang bagaimana relasi simbolik antara laki-laki dan perempuan di Bali sedang mengalami rekonstruksi menuju bentuk harmoni yang lebih inklusif. Dari sinilah benih hegemoni baru tumbuh — bukan hegemoni yang menindas, melainkan hegemoni yang memberi ruang bagi dialog, kesadaran, dan kemanusiaan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa disharmoni rumah tangga di Bali tidak semata-mata disebabkan oleh kegagalan komunikasi interpersonal, melainkan merupakan hasil dari pertarungan wacana yang kompleks dalam struktur sosial dan budaya. Melalui pendekatan analisis wacana kritis berbasis teori Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, ditemukan bahwa komunikasi keluarga berperan sebagai arena artikulasi makna di mana nilai-nilai tradisional dan modern saling bertemu, bertarung, dan bernegosiasi.

Pertama, analisis terhadap wacana tradisional memperlihatkan kuatnya hegemoni nilai patriarkal yang menempatkan suami sebagai pusat otoritas dan istri sebagai subjek kepatuhan. Wacana ini memproduksi pengertian “keluarga harmonis” sebagai ketaatan sepihak, yang diperkuat oleh bahasa, ritual, dan norma sosial. Namun, hegemoni tersebut mulai terguncang oleh munculnya realitas sosial baru yang menempatkan perempuan dalam peran publik, ekonomi, dan komunikasi yang lebih aktif.

Kedua, melalui proses artikulasi dan negosiasi makna, pasangan keluarga di Bali mulai menafsir ulang nilai-nilai lama seperti bakti dan menyama braya menjadi dasar moral untuk membangun hubungan yang lebih setara. Praktik komunikasi reflektif—seperti berbagi beban domestik, saling mendengarkan, dan mengambil keputusan bersama—menjadi bentuk konkret dari artikulasi wacana kesetaraan yang tumbuh di tengah modernitas.

Dengan demikian, keluarga tidak hanya menjadi ruang reproduksi nilai, tetapi juga menjadi arena produksi makna baru.

Ketiga, terjadinya dislokasi wacana tradisional membuka peluang bagi rekonstruksi harmoni yang lebih inklusif. Generasi muda Bali menunjukkan bentuk harmoni baru yang tidak meniadakan adat, tetapi menafsirkannya ulang sebagai ruang kolaborasi spiritual dan emosional. Dalam tatanan ini, harmoni tidak lagi dimaknai sebagai ketiadaan konflik, melainkan sebagai kemampuan mengelola perbedaan melalui komunikasi yang dialogis, setara, dan empatik. Secara teoretis, penelitian ini menegaskan relevansi teori wacana Laclau dan Mouffe untuk memahami dinamika komunikasi keluarga di masyarakat yang tengah mengalami perubahan budaya. Secara praktis, hasil penelitian ini mengimplikasikan pentingnya pendidikan komunikasi keluarga berbasis kesetaraan simbolik yang berpijak pada nilai budaya lokal. Dengan demikian, keluarga Bali dapat menjadi contoh bagaimana tradisi dan modernitas dapat berkelindan secara produktif, membentuk hegemoni baru yang lebih manusiawi dan reflektif terhadap perubahan zaman.

Temuan penelitian ini memperluas cakrawala kajian komunikasi keluarga dalam kerangka teori wacana pos-Marxis Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe. Selama ini, studi tentang disharmoni rumah tangga umumnya berfokus pada aspek psikologis atau komunikasi interpersonal (DeVito, 2019; Galvin et al., 2016). Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketegangan dalam rumah tangga justru merepresentasikan proses artikulasi dan dislokasi makna yang bersifat ideologis.

Dengan demikian, penelitian ini memperkuat posisi teori hegemoni dan dislokasi sebagai instrumen analitis yang mampu menjelaskan dinamika makna “harmoni” dalam konteks budaya yang mengalami transisi. Dalam konteks Bali, konsep-konsep seperti *purusa-pradana*, *dharma grihastha*, dan *menyama braya* dapat dipahami bukan sebagai entitas statis, tetapi sebagai tanda yang terus dinegosiasikan dalam praktik komunikasi keluarga. Secara epistemologis, penelitian ini menegaskan bahwa keluarga bukan hanya unit sosial terkecil, melainkan juga ruang diskursif di mana ideologi, bahasa, dan kekuasaan bekerja secara mikro. Artinya, setiap percakapan, diam, atau keputusan rumah tangga sesungguhnya merupakan tindakan politik simbolik yang membentuk dan mereproduksi relasi sosial.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi praktis penting bagi upaya penguatan ketahanan keluarga berbasis budaya. Pertama, lembaga pendidikan dan keagamaan di Bali dapat mengembangkan program literasi komunikasi keluarga yang menekankan kesetaraan simbolik dan empati komunikatif. Pendekatan ini dapat memperkuat kemampuan pasangan untuk mengelola perbedaan nilai dan peran tanpa merusak struktur budaya lokal. Kedua, lembaga adat seperti *desa pakraman* dan *banjar* dapat menjadi mediator sosial dalam mengarusutamakan paradigma baru tentang harmoni keluarga. Melalui penyuluhan berbasis budaya, nilai-nilai *Rwa Bhineda* dan *Tri Hita Karana* dapat ditafsir ulang secara kontekstual agar relevan dengan realitas modern. Ketiga, hasil ini juga dapat menjadi acuan bagi lembaga konseling keluarga dan organisasi perempuan di Bali untuk merancang intervensi berbasis komunikasi reflektif, yang mengutamakan proses dialog, pengakuan emosi, serta keadilan relasional dalam pernikahan. Dengan demikian, konflik rumah tangga tidak lagi dipahami sebagai kegagalan moral, tetapi sebagai peluang untuk membangun harmoni yang lebih adaptif dan sejajar.

Penelitian ini menyarankan agar kajian komunikasi keluarga ke depan memperluas dimensi analisisnya ke ruang digital dan media sosial. Di era teknologi komunikasi saat ini, representasi “keluarga harmonis” tidak hanya dibangun melalui praktik langsung, tetapi juga melalui performativitas simbolik di platform seperti Instagram dan TikTok, di mana pasangan menampilkan citra keluarga ideal. Kajian selanjutnya dapat menggabungkan

analisis wacana digital untuk melihat bagaimana konstruksi harmoni dan gender dinegosiasikan melalui media. Selain itu, diperlukan penelitian lintas daerah dan lintas agama untuk membandingkan bagaimana proses artikulasi, hegemoni, dan dislokasi wacana keluarga terjadi dalam konteks budaya lain di Indonesia. Pendekatan interdisipliner antara *cultural studies*, komunikasi, dan gender studies akan memperkaya pemahaman kita mengenai dinamika keluarga dalam masyarakat yang sedang berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, P. S., & Fikriyati, D. (2024). Patriarki dan diam sebagai strategi komunikasi perempuan Bali dalam rumah tangga. *Jurnal Gender dan Komunikasi*, 4(1), 45–60.
- Budiasa, I. M. (2019). Representasi wacana tanpa kekerasan di cybermedia dalam praksis budaya Hindu-Bali: A critical discourse analysis. *Vidya Samhita: Jurnal Penelitian Agama*, 5(1), 45–56.
- DeVito, J. A. (2019). *The interpersonal communication book* (15th ed.). Pearson.
- Fairclough, N. (2003). *Analysing discourse: Textual analysis for social research*. Routledge.
- Galvin, K. M., Braithwaite, D. O., & Bylund, C. L. (2016). *Family communication: Cohesion and change* (10th ed.). Routledge.
- Howarth, D. (2013). *Poststructuralism and after: Structure, subjectivity and power*. Palgrave Macmillan.
- Jorgensen, M. W., & Phillips, L. J. (2002). *Discourse analysis as theory and method*. Sage Publications.
- Laclau, E. (1990). *New reflections on the revolution of our time*. Verso.
- Laclau, E., & Mouffe, C. (1985). *Hegemony and socialist strategy: Towards a radical democratic politics*. Verso.
- Mouffe, C. (2000). *The democratic paradox*. Verso.
- Subagia, I. N. (2016). *Nilai-nilai purusa-pradana dalam konteks sosial budaya Bali*. Udayana University Press.
- Suryani, N. L. (2021). Komunikasi keluarga dalam dinamika perubahan sosial di Bali. *Jurnal Komunikasi dan Budaya*, 13(2), 145–160.
- Utama, I. G. (2022). Kesetaraan gender dalam perspektif budaya Bali kontemporer. *Jurnal Kajian Gender dan Pembangunan*, 7(1), 33–48.
- Validnews Indonesia. (2025, March). Perceraian tak hanya menghasilkan perpisahan. <https://validnews.id/nasional/perceraian-tak-hanya-menghasilkan-perpisahan>
- Viva Bali. (2024, February). Lebih baik bertahan demi anak atau berpisah demi kewarasan? <https://bali.viva.co.id/lifestyle/4354-lebih-baik-bertahan-demi-anak-atau-berpisah-demi-kewarasan>
- Wardani, N. M., & Yunanto, A. (2023). Patriarki dan komunikasi keluarga di Bali: Perspektif budaya dan agama Hindu. *Jurnal Komunikasi dan Masyarakat*, 5(2), 101–118.
- Wibawa, I. K., Hasibuan, R., & Sisdyani, E. A. (2023). Strategi komunikasi dan peran perempuan Bali dalam pengelolaan keuangan keluarga. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 9(3), 233–249.
- Yuniari, N. P., & Saskara, I. A. (2023). Norma budaya, kebahagiaan, dan komunikasi generasi sandwich di Bali. *Jurnal Psikologi dan Budaya*, 6(1), 21–35.